

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

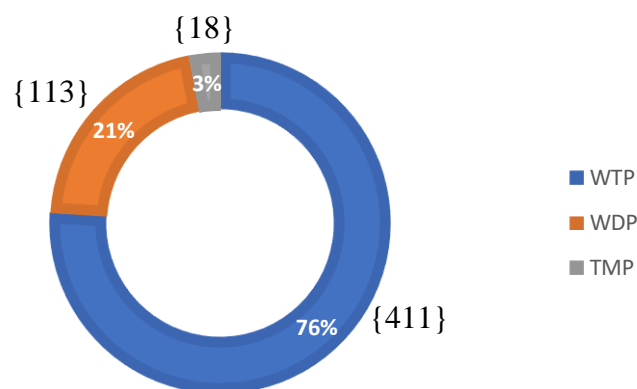
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Media pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah apakah sudah dijalankan dengan baik dan digunakan untuk mengambil keputusan pada pemangku kepentingan. Sehingga laporan keuangan tidak boleh berisi informasi yang menyesatkan karena dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) wajib menyampaikan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (M.Ramli: 2016:7). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

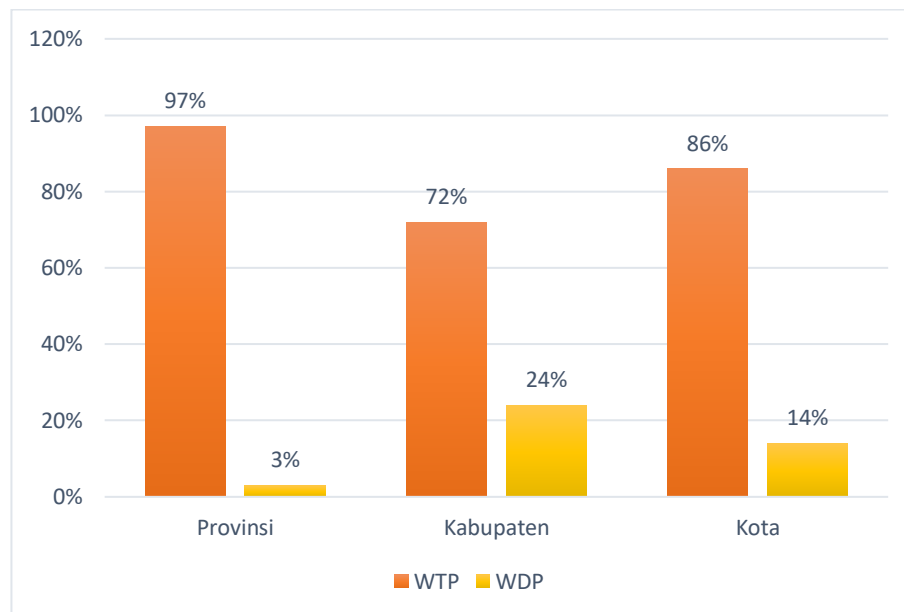
Berdasarkan hasil pemeriksaan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2017 tersebut, BPK memberikan 411 opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%), dan 18 opini TMP (3%).



**Gambar 1.1**

**Grafik 1 Opini LKPD 2017**

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%), opini WDP pemerintah provinsi (3%), pemerintah kabupaten (24%), dan pemerintah kota (14%) .



**Gambar 1.2**

**Grafik 2 Opini**

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan (IHPS) I Tahun 2018 bahwa BPK menemukan 2.903 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp. 1,54 Triliun dalam Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2017. Selain mengakibatkan kerugian, permasalahan ketidakpatuhan juga mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 426 permasalahan senilai Rp 317,87 miliar, 868 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 686,49 miliar, serta 2,361 permasalahan penyimpangan administrasi. Atas keseluruhan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan, pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan penyerahan asset dan menyeteror ke kas negara/daerah senilai Rp 476,65 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2017 antara lain kekurangan volume pekerjaan/barang senilai Rp 547,96 miliar yang terjadi

pada 475 pemda, selanjutnya ditemukan juga belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada 395 Pemda senilai Rp 344,45 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pada 262 Pemda senilai Rp 148,04 miliar, perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan senilai Rp 87,45 miliar pada 232 Pemda, serta pengguna uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp 20,72 miliar terjadi pada 54 Pemda. (sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) )

BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten kota. Ia menuturkan tiga daerah yang masih mendapat opini WDP ini secara Kualitas pelaporan sudah mengalami perkembangan dibandingkan sebelumnya. Namun, perkembangan itu belum cukup untuk meraih opini WTP. Contohnya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Subang Jawa Barat, BPK Perwakilan Jabar menemukan adanya persoalan pengambilalihan pasar baru senilai Rp 10,8 miliar. Pemkab Subang belum menginventarisir piutang dari proses pengambilalihan pasar baru. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat tidak dapat dipahami. ([news.detik.com](http://news.detik.com))

Sedangkan permasalahan yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Sukabumi bahwa dalam catatan Fitra setidaknya terdapat 10 persoalan yang hampir terjadi setiap tahunnya, pada temuan BPK yang dituangkan dalam LHP tahun 2017 memuat persoalan PD Waluya yang mengalami kerugian hingga Rp 8,9 milyar akibat lemahnya pengelolaan administrative dan kontrol dari Pemkot Sukabumi, menurut Fahmi – Andri (Walikota Sukabumi), ada beberapa catatan yang harus diselesaikan diantaranya :

1. Pembukaan rekening kas dan penempatan Deposito RSUD R. Syamsudin di bank “WS” sebesar Rp. 1,5 Milyar menghasilkan bunga deposito dikenakan PPh 10% menyalahi aturan. Karena menurut pasal 18 – 19 PP No. 39 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Walikota No. 29 tahun 2019 tentang Juknis Pengelolaan Keuangan RSUD R. Syamsudin.
2. Kesalahan memberikan gaji pada pegawai yang mutasi keluar sebesar Rp. 124,4 juta karena keterlambatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Sukabumi. Serta Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Guru yang telah meninggal dunia dan pensiun atas permintaan sendiri sebesar Rp. 28,6 Juta.
3. Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultasi di Dinas Perhubungan dan Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan belum sepenuhnya memadai.
4. Belanja Hibah dan Bansos TA. 2017 tidak sesuai ketentuan karena penerima hibah belum memberikan LPJ, belum menyetor jasa giro dan Dari 323 pihak yang menerima bansos, 25 diantaranya belum ditetapkan dalam SK Walikota No 216 tahun 2017 tentang perubahan SK 32 tahun 2017 tentang penerima bansos dalam bentuk uang dari Pemkot Sukabumi TA. 2017.
5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada empat OPD (Dinkes, Setda, Setwan dan Bappeda) sebesar Rp. 164 Juta tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal ini dibuktikan perbedaan harga

dasar tiket pesawat “Garuda”, biaya penginapan/hotel, transportasi luar kota tidak memiliki bukti, transportasi lokal tidak sesuai ketentuan, pembayaran uang harian fullboard tidak sesuai ketentuan.

6. Kesalahan penganggaran sebesar Rp. 14 Milyar di empat OPD (Disdik, BPKD, Dinas Perhubungan dan Dinas PU).
7. Kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian spesifikasi pengerjaan fisik di Dinas Perhubungan senilai Rp. 210,8 Juta. Peningkatan kapasitas jalan Sindang Sari, Peningkatan struktur jalan Jeruk Nyelap, Peningkatan kapasitas jalan Caringin Ngumbang, Peningkatan kapasitas jalan Sukakarya, Pembangunan jalan Ciandam, Peningkatan kapasitas jalan Rancakadu, Peningkatan struktur jalan tembus Stasiun Timur, Pembangunan jalan Kapitan, Peningkatan kapasitas Lamping dan Pembangunan jalan Laks. RE. Martadinata.
8. Kelebihan pembayaran pada pembangunan GOR Merdeka sebesar Rp. 291,6 Juta serta Rp. 55,2 juta dalam pekerjaan pembongkaran GOR Merdeka lama.
9. Belanja makan minum pada Sekretariat DPRD belum dipotong pajak minimal sebesar Rp. 97,6 Juta.
10. Penggunaan dana BOS tidak berpedoman pada JUKNIS Persentase Pembiayaan Komponen Kegiatan

(sumber : *sukabumiupdate.com*) LHK BPK 2018

Berdasarkan fenomena tersebut, diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang

mengakibatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah. Seharusnya dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum agar laporan keuangan bisa relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga pemerintah daerah dapat menentukan dan merencanakan arah pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Hariandi (112:2013) SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia “SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” SAP menjadi satu-satunya standar pelaksanaan akuntansi pemerintahan sehingga upaya pengharmonisan berbagai peraturan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan SAP mutlak. Standar yang di terapkan di pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, permasalahan yang terjadi dalam laporan keuangan itu bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan dari audit internal. Karena kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh peran audit internal yang bekerja dalam penyusunan laporan keuangan. Faiz (2018:13). Audit internal menurut *International Standards for the Profesional Practice of Internal Auditing* adalah suatu kegiatan *assurance* dan *consulting* (konsultasi) yang independent dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi.

Inspektorat sebagai audit internal pemerintah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Pemeriksaan merupakan standar ketentuan yang mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor.

Berikut ini beberapa peneliti sebelumnya mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah :

**Table 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti    | judul Peneliti   | hasil Penelitian   | Perbedaan   |
|----|------------------|--|--|---|
| 1  | Dhedy Triwardana | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan | Bahwa terdapat pengaruh Standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah hal ini dilihat dari hasil uji | - Mengurangi 1 variabel, peneliti hanya menggunakan variable penerapan sap dan Peran audit internal<br>- Tempat yang berbeda, peneliti di |



|   |                         |   |   |  |
|---|-------------------------|---|---|--|
|   |                         | Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.  | hipotesis setiap variable berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  | Pemerintah kota Sukabumi   |
| 2 | Arif Ardi Kusumah       | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Kota Tasikmalaya. | Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dilihat dari uji hipotesisnya | - Penambahan 1 variabel peneliti menambahkan variabel peran audit internal saja.<br>- Tempat yang berbeda, peneliti meneliti di Pemerintah kota Sukabumi                             |
| 3 | Nazaruddin dan Syahrial | Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Lhokseumawe                | - Bahwa Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe                   | - Menambah 1 variabel peneliti hanya menggunakan variable penerapan sap dan peran audit internal daerah saja<br>- Tempat yang berbeda, peneliti meneliti di Pemerintah kota Sukabumi |

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah di uraikan, maka penulis tertarik menulis penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya belanja daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan
2. Masih lemahnya pengelolaan administratif
3. Lemahnya kontrol dari pemerintah kota Sukabumi
4. Masih lemahnya pengawasan dari audit internal
5. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi sepenuhnya belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan
6. Masih banyaknya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
7. Masih adanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi
8. Masih adanya kesalahan penganggaran

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah
2. Untuk mengetahui Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah
3. Untuk mengetahui Pengaruh Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memperluas wawasan ilmu akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangan, khususnya laporan keuangan sector public pemerintah/daerah karena laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kualitas dan kondisi pemerintahan yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk peneliti yang akan datang.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### b. Bagi Pihak Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah serta dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang akan datang serta dapat memberikan informasi khususnya mengenai penerapan standar akuntansi, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.